

## Kesiapan Masyarakat dalam Demokrasi Politik di Desa Toundanow Atas

Anggreiny Tampongangoy<sup>1</sup>, Romi Mesra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: <sup>1</sup>[20606052@unima.ac.id](mailto:20606052@unima.ac.id), <sup>2</sup>[romimesra@unima.ac.id](mailto:romimesra@unima.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received September 20, 2025

Accepted Oktober 15, 2025

Published November 30, 2025

#### Keywords:

Kesiapan Masyarakat,  
 Demokrasi Politik,  
 Partisipasi,  
 Desa,  
 Otonomi Desa



### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan masyarakat dalam demokrasi politik di Desa Toundanow Atas, Sulawesi Utara, dengan fokus pada pemahaman demokrasi, pola partisipasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses politik desa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam terhadap informan kunci yang terdiri dari aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga. Analisis data dilakukan secara induktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diverifikasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang demokrasi masih berorientasi pada dimensi prosedural, khususnya partisipasi dalam pemilihan, sementara pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi substantif masih terbatas. Pola partisipasi masyarakat cenderung mobilisatif dan didominasi elit desa, belum mencapai tingkat deliberatif yang inklusif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan masyarakat mencakup tingkat pendidikan dan literasi politik, kondisi ekonomi, nilai-nilai budaya lokal dan keagamaan, serta kapasitas kepemimpinan desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kesiapan masyarakat dalam demokrasi politik memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan literasi politik, penciptaan ruang deliberasi inklusif, transformasi kepemimpinan, dan peningkatan transparansi pemerintahan desa.

### Abstract

*This study aims to analyze community readiness for political democracy in Toundanow Atas Village, North Sulawesi, with a focus on understanding democracy, participation patterns, and factors influencing community involvement in the village political process. The research method used a qualitative approach with data collection techniques through participant observation and in-depth interviews with key informants consisting of village government officials, community leaders, and residents. Data analysis was conducted inductively with the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions verified through triangulation of sources and methods. The results show that community understanding of democracy is still oriented towards the procedural dimension, particularly participation in elections, while understanding of substantive democratic principles is still limited. Community participation patterns tend to be mobilized and dominated by village elites, not yet reaching an inclusive deliberative level. Factors influencing community readiness include education level and political literacy, economic conditions, local cultural and religious values, and village leadership capacity. This study concludes that strengthening community readiness for political democracy requires a holistic approach that includes strengthening political literacy, creating inclusive deliberation spaces, leadership transformation, and increasing transparency in village government.*

**Keywords:** Community Readiness, Political Democracy, Participation, Village, Village Autonomy

## **A. Pendahuluan**

Demokrasi di tingkat desa menjadi fondasi penting dalam sistem pemerintahan demokratis Indonesia, di mana partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pemberian suara dalam pemilihan tetapi juga keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan desa (Surbakti, 2010). Implementasi demokrasi di level pemerintahan terkecil ini menjadi indikator utama kualitas demokrasi nasional, mengingat desa merupakan basis kehidupan politik masyarakat yang paling dekat dengan rakyat. Dalam konteks otonomi desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat diberikan ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (Widjaja, 2014). Namun demikian, kesiapan masyarakat dalam menjalankan peran demokratis ini masih menjadi pertanyaan krusial, terutama terkait dengan pemahaman, kesadaran politik, dan kapasitas masyarakat dalam mengambil bagian secara efektif dalam proses-proses demokratis di desa.

Kesiapan masyarakat dalam demokrasi politik tidak terlepas dari tingkat literasi politik, kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan ruang-ruang partisipasi yang tersedia (Budiardjo, 2008). Di banyak desa, partisipasi politik masyarakat masih terbatas pada kegiatan elektoral seperti pemilihan kepala desa, sementara keterlibatan dalam perencanaan pembangunan, pengawasan anggaran, dan evaluasi kebijakan desa masih relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun struktur demokrasi formal telah tersedia, namun substansi demokrasi yang mensyaratkan partisipasi aktif dan deliberatif belum sepenuhnya terwujud. Desa Toundanow Atas yang terletak di wilayah Sulawesi Utara, sebagai bagian dari dinamika demokrasi lokal Indonesia, juga menghadapi tantangan serupa dalam membangun budaya demokrasi yang partisipatif dan inklusif.

Kompleksitas demokrasi di tingkat desa semakin terlihat ketika mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, akses terhadap informasi, serta nilai-nilai budaya lokal menjadi determinan penting dalam membentuk pola partisipasi politik masyarakat desa (Mas'ood, 2006). Dalam konteks Indonesia, di mana keragaman sosial-budaya sangat tinggi, pola partisipasi politik di setiap desa bisa berbeda-beda tergantung pada karakteristik lokal masing-masing. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang kesiapan masyarakat dalam demokrasi politik di level desa menjadi sangat penting untuk merancang strategi penguatan demokrasi yang kontekstual dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan masyarakat Desa Toundanow Atas dalam menjalankan praktik demokrasi politik, dengan fokus pada aspek-aspek pemahaman demokrasi, pola partisipasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses politik desa.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi dinamika demokrasi dan partisipasi masyarakat di tingkat desa. Penelitian Sutoro (2015) tentang desa membangun Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih didominasi oleh elit desa dan belum melibatkan masyarakat secara luas, terutama kelompok marginal seperti perempuan dan kaum muda. Studi ini menemukan bahwa meskipun forum-forum musyawarah desa telah diselenggarakan secara rutin, namun kualitas deliberasi dan inklusivitas masih rendah karena dominasi tokoh-tokoh tertentu yang cenderung mengontrol agenda dan keputusan. Selain itu, penelitian Antlov (2003) mengenai demokrasi desa di Indonesia menyoroti bahwa transisi dari sistem pemerintahan otoriter ke demokratis telah membuka ruang partisipasi yang lebih luas, namun praktik-praktik patronase dan politik uang masih mengakar kuat di level desa. Fenomena ini mengindikasikan bahwa transformasi struktural kelembagaan belum diikuti dengan perubahan kultur politik masyarakat, di mana nilai-nilai demokrasi substantif seperti transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan belum sepenuhnya terinternalisasi

dalam praktik politik sehari-hari.

Studi lain yang dilakukan oleh Pradana (2018) tentang implementasi demokrasi deliberatif di desa menemukan bahwa model musyawarah desa yang mengadopsi prinsip deliberatif cukup efektif dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, terutama ketika difasilitasi dengan baik dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberikan ruang untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara substantif, maka legitimasi dan penerimaan terhadap kebijakan desa menjadi lebih tinggi. Namun demikian, studi ini juga mengidentifikasi bahwa kapasitas fasilitator, komitmen pemerintah desa, dan dukungan infrastruktur partisipatif menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan demokrasi deliberatif. Dengan demikian, penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan gambaran umum tentang dinamika dan tantangan demokrasi desa di Indonesia, namun belum secara spesifik menganalisis kesiapan masyarakat sebagai faktor fundamental dalam menentukan efektivitas praktik demokrasi di level lokal.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji partisipasi masyarakat dan praktik demokrasi di tingkat desa, namun masih terdapat kesenjangan pengetahuan terkait dengan aspek kesiapan masyarakat sebagai prasyarat bagi terwujudnya demokrasi yang berkualitas. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada analisis struktural dan kelembagaan, seperti mekanisme musyawarah desa, peran pemerintah desa, dan regulasi yang mengatur partisipasi, namun belum banyak yang menggali secara mendalam tentang dimensi kesiapan masyarakat dari aspek kognitif, afektif, dan konatif. Kesiapan kognitif berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang konsep dan prinsip demokrasi, kesiapan afektif berkaitan dengan sikap dan nilai yang dianut masyarakat terhadap demokrasi, sementara kesiapan konatif berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses demokratis. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan menentukan sejauh mana masyarakat siap untuk menjalankan peran demokratis mereka dalam konteks pemerintahan desa.

Selain itu, sebagian besar studi tentang demokrasi desa dilakukan di wilayah Jawa dan daerah-daerah dengan akses informasi dan infrastruktur yang relatif baik, sementara desa-desa di wilayah timur Indonesia, termasuk Sulawesi Utara, masih kurang mendapat perhatian dalam literatur akademis. Padahal, konteks geografis, sosial, dan budaya yang berbeda di setiap wilayah dapat mempengaruhi pola dan kesiapan masyarakat dalam berdemokrasi. Desa Toundanow Atas dengan karakteristik lokalnya yang unik memerlukan kajian tersendiri untuk memahami bagaimana kesiapan masyarakat lokal dalam menghadapi tuntutan demokrasi di era otonomi desa. Kesenjangan ini penting untuk dijembatani agar pemahaman tentang demokrasi desa di Indonesia menjadi lebih komprehensif dan representatif, tidak hanya berbasis pada pengalaman desa-desa di wilayah tertentu saja, tetapi juga mencakup keragaman konteks desa di seluruh nusantara.

Novelty atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap konsep kesiapan masyarakat (*community readiness*) dalam konteks demokrasi politik di tingkat desa, yang berbeda dengan pendekatan partisipasi masyarakat yang sudah banyak dikaji sebelumnya. Konsep kesiapan masyarakat mengasumsikan bahwa keberhasilan implementasi demokrasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan struktur dan mekanisme formal, tetapi juga pada kapasitas dan kondisi internal masyarakat itu sendiri untuk menerima, memahami, dan menjalankan nilai-nilai serta praktik demokrasi. Penelitian ini mengadopsi model kesiapan masyarakat yang mengintegrasikan dimensi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku politik, sehingga memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kondisi masyarakat dalam menghadapi tuntutan demokrasi. Pendekatan ini berbeda dari studi-studi sebelumnya yang cenderung mengukur partisipasi hanya dari frekuensi kehadiran atau keterlibatan dalam forum-

forum desa, tanpa menggali lebih dalam apakah masyarakat benar-benar memahami, memiliki sikap positif, dan mampu berpartisipasi secara efektif.

Selain itu, penelitian ini juga menawarkan kontribusi empiris dengan mengambil lokus di Desa Toundanow Atas, Sulawesi Utara, yang merupakan wilayah yang belum banyak dieksplorasi dalam kajian demokrasi desa. Dengan mengungkap dinamika lokal, nilai-nilai budaya, dan praktik politik yang berkembang di masyarakat Toundanow Atas, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang demokrasi desa di Indonesia dan memberikan perspektif baru tentang bagaimana konteks lokal mempengaruhi kesiapan masyarakat dalam berdemokrasi. Temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dalam merancang program penguatan kapasitas masyarakat yang lebih kontekstual dan efektif, tidak hanya bersifat one-size-fits-all tetapi mempertimbangkan keunikan dan kesiapan masing-masing desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori tentang demokrasi lokal, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi peningkatan kualitas demokrasi di tingkat akar rumput.

Realitas demokrasi politik di tingkat desa saat ini menunjukkan paradoks antara capaian formal dan substansi yang masih memerlukan penguatan. Secara formal, Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup progresif dalam mendorong partisipasi masyarakat desa melalui berbagai instrumen seperti musyawarah desa, perencanaan pembangunan partisipatif, dan mekanisme akuntabilitas publik. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan landasan kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Namun dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai demokrasi di banyak desa masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari rendahnya kesadaran politik masyarakat, dominasi elit lokal, hingga keterbatasan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi proses-proses partisipatif yang bermakna. Di Desa Toundanow Atas, seperti halnya banyak desa lain di Indonesia, tantangan-tantangan ini juga dihadapi, di mana masyarakat memang turut serta dalam kegiatan-kegiatan politik desa, namun kualitas partisipasi dan pemahaman tentang substansi demokrasi masih perlu ditingkatkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan masyarakat dalam demokrasi politik di desa sangat beragam, mencakup aspek pendidikan, ekonomi, akses informasi, dan budaya politik lokal. Masyarakat dengan tingkat pendidikan dan literasi politik yang rendah cenderung memiliki pemahaman yang terbatas tentang hak-hak politik mereka dan cara menggunakannya secara efektif. Kondisi ekonomi yang sulit juga seringkali membuat masyarakat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar sehingga partisipasi politik menjadi prioritas sekunder. Selain itu, budaya politik paternalistik yang masih kuat di banyak desa membuat masyarakat cenderung pasif dan menyerahkan pengambilan keputusan kepada tokoh-tokoh atau elit desa, sehingga ruang deliberasi dan dialog yang setara menjadi terbatas. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang baru bagi peningkatan literasi politik masyarakat, meskipun kesenjangan akses masih menjadi tantangan tersendiri, terutama di desa-desa yang berada di wilayah terpencil. Memahami realitas kompleks ini menjadi penting untuk dapat merancang intervensi yang tepat dalam meningkatkan kesiapan masyarakat Desa Toundanow Atas dan desa-desa lainnya dalam menjalankan demokrasi politik yang substantif dan bermakna.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang kesiapan masyarakat dalam demokrasi politik di Desa Toundanow Atas. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali makna, pemahaman, dan pengalaman subjektif masyarakat terkait dengan praktik demokrasi di tingkat desa. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi kesiapan masyarakat dalam berpartisipasi dalam demokrasi politik secara komprehensif dan kontekstual. Lokasi penelitian dipilih secara purposif di Desa Toundanow Atas dengan pertimbangan bahwa desa ini memiliki karakteristik unik dalam konteks sosial-budaya masyarakat Sulawesi Utara, serta memiliki dinamika politik lokal yang menarik untuk dikaji dalam kerangka implementasi demokrasi desa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara mendalam sebagai instrumen utama. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik-praktik demokrasi yang berlangsung di desa, termasuk kegiatan musyawarah desa, pertemuan warga, dan interaksi politik lainnya yang terjadi di tingkat akar rumput. Melalui observasi partisipatif, peneliti dapat memperoleh gambaran otentik tentang bagaimana masyarakat berinteraksi dalam ruang-ruang politik, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana nilai-nilai demokrasi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Creswell (2017) menekankan bahwa observasi dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mencatat perilaku langsung dari individu tanpa harus menanyakan pertanyaan langsung kepada mereka, sehingga data yang diperoleh lebih natural dan tidak terkontaminasi oleh respons yang mungkin bias. Selain observasi, wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci yang terdiri dari aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga biasa yang dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam aktivitas politik desa. Wawancara semi-terstruktur dipilih untuk memberikan fleksibilitas bagi peneliti dalam menggali informasi lebih dalam sambil tetap mempertahankan fokus pada tema-tema utama penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model analisis kualitatif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang data yang tidak relevan, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Miles dan Huberman (2014) menjelaskan bahwa penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk teks naratif, matriks, grafik, atau bagan yang memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar-konsep yang muncul dari data, serta melakukan verifikasi dengan triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Keabsahan data dijaga melalui proses triangulasi, member checking, dan prolonged engagement di lapangan untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang dialami oleh masyarakat Desa Toundanow Atas dalam konteks demokrasi politik.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **a. Pemahaman Masyarakat tentang Demokrasi Politik**

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Toundanow Atas tentang demokrasi politik masih berada pada tataran prosedural dan belum sepenuhnya menyentuh substansi demokrasi. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, aktivitas demokrasi yang paling menonjol adalah partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan kegiatan musyawarah desa yang diselenggarakan secara periodik. Masyarakat memahami demokrasi terutama sebagai kesempatan untuk memilih pemimpin desa, sebagaimana diungkapkan oleh SA selaku Kepala Jaga 1 yang menyatakan,

”...siap untuk berperan aktif dalam demokrasi politik khususnya dalam konteks Pemilihan yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024”.

Wawancara dengan bapak SA



Sumber: Data Primer

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemahaman tentang demokrasi masih sangat terkait dengan momen-momen elektoral, sementara aspek-aspek demokrasi lainnya seperti partisipasi dalam perencanaan pembangunan, pengawasan pemerintahan, dan akuntabilitas publik belum menjadi fokus perhatian utama masyarakat.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Ibu YD mengungkapkan,

”...dimensi budaya demokrasi yang mulai berkembang di tingkat masyarakat, di mana menekankan pentingnya saling menghargai pendapat orang lain dalam kehidupan bermasyarakat dan menyuarkan aspirasi demi kemajuan Desa Toundanow Atas”.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa ada kesadaran di kalangan masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, kebebasan berpendapat, dan partisipasi aktif. Ibu Yuli juga menyebutkan pentingnya mengikuti sosialisasi tentang demokrasi, terutama menjelang pemilihan, yang mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki keinginan untuk belajar dan meningkatkan pemahaman mereka tentang proses demokratis. Namun demikian, observasi peneliti menunjukkan bahwa dalam praktiknya, ruang-ruang dialog dan musyawarah di desa masih didominasi oleh tokoh-tokoh tertentu, dan keterlibatan masyarakat luas dalam diskusi substansif tentang kebijakan desa masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual tentang demokrasi dengan praktik demokrasi yang sesungguhnya.

Temuan menarik juga diperoleh dari wawancara dengan Ibu MK yang mengungkapkan,

”...nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, kerja sama, dan tanggung jawab sebagai prinsip-prinsip penting dalam berdemokrasi. Sikap toleransi dalam hal golongan gereja dan tidak memandang perbedaan, yang menunjukkan bahwa konteks keagamaan dan sosial-budaya lokal mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang demokrasi”.

Hal ini sejalan dengan karakteristik masyarakat Indonesia pada umumnya yang majemuk, di mana nilai-nilai demokrasi sering diinterpretasikan dan dipraktikkan dalam bingkai nilai-nilai lokal dan keagamaan. Pemahaman tentang demokrasi yang bersifat plural dan inklusif ini merupakan modal sosial yang penting bagi pengembangan demokrasi yang lebih substantif di desa. Namun, peneliti juga mengamati bahwa pemahaman tentang mekanisme formal demokrasi seperti checks and balances, transparansi anggaran, dan akuntabilitas pemerintahan masih perlu diperkuat melalui pendidikan politik dan sosialisasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

### **b. Pola Partisipasi Masyarakat dalam Proses Politik Desa**

Observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik di Desa Toundanow Atas masih bersifat mobilisatif dan terpusat pada momen-momen politik tertentu, khususnya pemilihan kepala desa. Antusiasme masyarakat cenderung meningkat ketika menjelang pemilihan, namun menurun pada periode-periode antara pemilihan. Pola partisipasi semacam ini mengindikasikan bahwa kesadaran politik masyarakat masih berorientasi pada hasil (*output*) berupa pemilihan pemimpin, namun belum sepenuhnya berorientasi pada proses (*process*) seperti pengawasan, evaluasi, dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Dalam kegiatan musyawarah desa yang diamati peneliti, kehadiran masyarakat memang cukup signifikan, namun keterlibatan aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan masih didominasi oleh aparat desa, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pengaruh sosial-politik di desa.

Wawancara dengan Ibu YD



Sumber: Data Primer

Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, terungkap bahwa masyarakat memiliki kesadaran tentang pentingnya partisipasi dalam demokrasi, namun terdapat berbagai hambatan yang membatasi partisipasi aktif mereka. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan waktu karena kesibukan ekonomi, rendahnya kepercayaan terhadap efektivitas partisipasi mereka dalam mempengaruhi kebijakan, serta kurangnya akses terhadap informasi tentang program-program dan kebijakan pemerintah desa. SA sebagai aparatur pemerintah desa mengakui

pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat, namun juga mengakui bahwa masih ada tantangan dalam membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh lapisan masyarakat. Keterbatasan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi proses partisipatif yang inklusif dan bermakna juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas partisipasi masyarakat.

Menariknya, hasil penelitian menunjukkan adanya diferensiasi pola partisipasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, dan gender. Kelompok masyarakat yang aktif berpartisipasi umumnya adalah mereka yang memiliki status sosial dan ekonomi yang relatif baik, memiliki akses terhadap informasi, dan memiliki jaringan sosial yang luas. Sementara itu, kelompok masyarakat marginal seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat ekonomi lemah cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah. Ibu YD dan MK sebagai informan perempuan menunjukkan bahwa ada kesadaran dan keinginan perempuan untuk terlibat dalam politik desa, namun masih terdapat hambatan struktural dan kultural yang membatasi ruang partisipasi mereka. Upaya untuk meningkatkan partisipasi yang lebih inklusif memerlukan strategi khusus yang sensitif terhadap keragaman kondisi dan kebutuhan masyarakat, termasuk pemberian afirmasi kepada kelompok-kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam proses politik desa.

### **c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Masyarakat dalam Demokrasi Politik**

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang mempengaruhi kesiapan masyarakat Desa Toundanow Atas dalam demokrasi politik. Faktor pertama adalah tingkat pendidikan dan literasi politik masyarakat. Meskipun tidak ada data kuantitatif yang dikumpulkan dalam penelitian ini, observasi dan wawancara menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak politik mereka dan lebih aktif dalam kegiatan politik desa. Sosialisasi yang disebutkan oleh Ibu YD sebagai media pembelajaran tentang demokrasi menunjukkan bahwa pendidikan politik informal melalui program-program pemerintah desa memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi politik masyarakat. Namun, efektivitas sosialisasi tersebut masih terbatas karena cenderung bersifat sporadis dan hanya dilakukan menjelang momen-momen politik tertentu.

Wawancara dengan Ibu MK



Sumber: Data Primer

Faktor kedua yang signifikan adalah nilai-nilai budaya lokal dan agama yang mempengaruhi cara masyarakat memahami dan mempraktikkan demokrasi. Pernyataan MK

tentang toleransi dalam konteks golongan gereja menunjukkan bahwa identitas keagamaan memainkan peran penting dalam membentuk pola interaksi politik di desa. Dalam konteks masyarakat yang religius, nilai-nilai demokrasi seperti kesetaraan, keadilan, dan musyawarah sering diinterpretasikan melalui kerangka nilai-nilai keagamaan. Hal ini di satu sisi dapat menjadi modal sosial yang memperkuat praktik demokrasi, namun di sisi lain juga dapat membatasi ruang kritik dan dialog rasional jika nilai-nilai keagamaan digunakan untuk menjustifikasi dominasi kelompok tertentu. Observasi peneliti menunjukkan bahwa dalam beberapa forum musyawarah, referensi kepada nilai-nilai agama sering digunakan untuk melegitimasi keputusan atau untuk meredam konflik, yang mengindikasikan kompleksitas hubungan antara agama dan politik di level desa.

Faktor ketiga adalah peran kepemimpinan dan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi proses demokratis. Komitmen Sonny Akay untuk berperan aktif dalam demokrasi politik menunjukkan bahwa ada kesadaran di kalangan aparat desa tentang pentingnya membangun demokrasi di tingkat lokal. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara komitmen normatif dengan praktik di lapangan. Keterbatasan kapasitas teknis pemerintah desa dalam mengelola proses partisipatif, transparansi informasi, dan akuntabilitas publik menjadi hambatan dalam mewujudkan demokrasi yang substantif. Selain itu, pola kepemimpinan yang masih bersifat paternalistik di mana masyarakat cenderung bergantung pada keputusan pemimpin juga mempengaruhi tingkat partisipasi aktif masyarakat. Untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam demokrasi politik, diperlukan pendekatan yang holistik yang tidak hanya fokus pada penguatan kapasitas individu masyarakat, tetapi juga penguatan kelembagaan pemerintah desa dan transformasi kultur politik yang lebih demokratis dan partisipatif.

## **2. Pembahasan**

### **a. Pemahaman Masyarakat tentang Demokrasi dalam Perspektif Teori Partisipasi Politik**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Toundanow Atas tentang demokrasi masih berorientasi pada dimensi prosedural, khususnya partisipasi dalam pemilihan kepala desa. Kondisi ini sejalan dengan konsep partisipasi politik yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson (1994) yang mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Namun demikian, Huntington dan Nelson juga membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom dan partisipasi yang dimobilisasi. Dalam konteks Desa Toundanow Atas, pola partisipasi masyarakat cenderung masih bersifat mobilisatif, di mana masyarakat berpartisipasi terutama ketika digerakkan oleh tokoh atau aparat desa, khususnya menjelang momen pemilihan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran politik intrinsik masyarakat belum sepenuhnya terbentuk, sehingga partisipasi lebih bersifat responsif terhadap stimulasi eksternal daripada inisiatif aktif yang lahir dari kesadaran akan hak dan kewajiban politik.

Budiardjo (2008) menjelaskan bahwa partisipasi politik yang berkualitas mensyaratkan adanya pemahaman yang memadai tentang konsep demokrasi, termasuk prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, dan akuntabilitas pemerintah. Dalam penelitian ini, meskipun informan seperti Ibu Yuli Dona dan Mercy Kumolontang menunjukkan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, kebebasan berpendapat, dan kerja sama, namun pemahaman ini belum sepenuhnya diterjemahkan dalam praktik partisipasi yang substantif. Observasi menunjukkan bahwa dalam forum musyawarah desa, masyarakat cenderung pasif

dan menyerahkan pengambilan keputusan kepada elit desa. Fenomena ini mencerminkan apa yang oleh Almond dan Verba (1963) disebut sebagai budaya politik subjek, di mana masyarakat memiliki kesadaran terhadap sistem politik namun orientasinya lebih bersifat pasif dan bergantung pada otoritas. Transformasi menuju budaya politik partisipan yang ditandai dengan keterlibatan aktif dan kritis dalam proses politik memerlukan penguatan literasi politik dan pembentukan kesadaran kritis masyarakat.

Lebih lanjut, temuan tentang pemahaman demokrasi yang terkait dengan konteks keagamaan sebagaimana diungkapkan oleh Mercy Kumolontang menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal dan agama memainkan peran penting dalam membentuk interpretasi masyarakat tentang demokrasi. Hal ini sejalan dengan perspektif demokratisasi di negara berkembang yang dikemukakan oleh Diamond (1999) yang menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial-budaya dalam memahami praktik demokrasi lokal. Nilai-nilai seperti toleransi beragama dan musyawarah yang berakar dalam tradisi lokal dapat menjadi modal sosial yang memperkuat demokrasi, namun perlu diartikulasikan secara lebih jelas dengan prinsip-prinsip demokrasi modern seperti transparansi, akuntabilitas, dan rule of law. Tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan norma-norma demokrasi universal tanpa menimbulkan kontradiksi atau konflik nilai yang dapat menghambat pengembangan demokrasi substantif di tingkat desa.

#### **b. Pola Partisipasi dalam Kerangka Teori Demokrasi Deliberatif**

Temuan penelitian tentang pola partisipasi masyarakat yang masih didominasi oleh elit desa dan terbatas pada forum-forum formal menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Desa Toundanow Atas belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif. Habermas (1996) dalam teorinya tentang demokrasi deliberatif menekankan pentingnya ruang publik (*public sphere*) di mana warga negara dapat berdialog secara rasional dan setara untuk mencapai konsensus tentang isu-isu publik. Dalam konteks Desa Toundanow Atas, meskipun forum musyawarah desa telah tersedia sebagai ruang partisipasi, namun kualitas deliberasi di dalamnya masih rendah karena tidak semua segmen masyarakat memiliki akses dan kemampuan yang sama untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dominasi tokoh tertentu dalam forum-forum tersebut mengindikasikan adanya distorsi komunikasi yang menurut Habermas dapat menghambat tercapainya legitimasi demokratis yang berbasis pada deliberasi rasional.

Fishkin (2009) mengembangkan konsep *deliberative polling* yang menekankan pentingnya menciptakan kondisi deliberasi yang ideal, di mana peserta memiliki informasi yang memadai, waktu yang cukup untuk berdiskusi, dan terbebas dari tekanan atau dominasi pihak tertentu. Dalam praktik di Desa Toundanow Atas, kondisi-kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Keterbatasan akses informasi, terutama di kalangan masyarakat marginal seperti perempuan dan kelompok ekonomi lemah, menyebabkan mereka kurang siap untuk berpartisipasi secara efektif dalam diskusi tentang kebijakan desa. Selain itu, pola komunikasi yang masih bersifat hierarkis dan paternalistik membuat banyak warga enggan atau tidak percaya diri untuk menyampaikan pendapat mereka, terutama jika berbeda dengan pendapat tokoh atau pemimpin desa. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas deliberatif masyarakat tidak hanya memerlukan penyediaan forum formal, tetapi juga transformasi kultur komunikasi politik yang lebih egaliter dan inklusif.

Arnstein (1969) dalam teorinya tentang tangga partisipasi (*ladder of participation*) mengidentifikasi delapan tingkat partisipasi mulai dari manipulasi hingga kontrol warga. Berdasarkan kerangka ini, pola partisipasi di Desa Toundanow Atas dapat dikategorikan berada pada tingkat konsultasi atau *informing*, di mana masyarakat diundang untuk memberikan masukan namun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah desa atau elit lokal.

Partisipasi pada tingkat ini belum dapat dikategorikan sebagai partisipasi substantif karena masyarakat belum memiliki kekuatan nyata untuk mempengaruhi keputusan. Untuk mencapai tingkat partisipasi yang lebih tinggi seperti *partnership* atau *citizen control*, diperlukan perubahan struktural dalam distribusi kekuasaan dan pengambilan keputusan di desa, termasuk penguatan mekanisme *checks and balances* dan pemberian ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam seluruh tahapan kebijakan mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 yang mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif dan demokratis.

### **c. Faktor-Faktor Determinan Kesiapan Masyarakat dalam Perspektif Teori Modal Sosial**

Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan masyarakat dalam penelitian ini menunjukkan kompleksitas dimensi yang berpengaruh, mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya, hingga kepemimpinan. Putnam (1993) dalam teorinya tentang modal sosial menekankan bahwa kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan (*trust*), norma-norma timbal balik (*reciprocity norms*), dan jaringan keterlibatan sipil (*networks of civic engagement*) yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks Desa Toundanow Atas, nilai-nilai seperti toleransi beragama dan kerja sama yang disebutkan oleh informan menunjukkan adanya modal sosial yang dapat menjadi fondasi bagi penguatan partisipasi demokratis. Namun demikian, observasi peneliti juga menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas partisipasi mereka dalam mempengaruhi kebijakan masih rendah, yang dapat mengindikasikan lemahnya dimensi *bridging social capital* yang menghubungkan masyarakat dengan institusi pemerintahan desa.

Verba, Schlozman, dan Brady (1995) dalam model sumber daya partisipasi politik (*civic voluntarism model*) mengidentifikasi tiga faktor utama yang mempengaruhi partisipasi politik: sumber daya (*resources*), keterlibatan psikologis (*psychological engagement*), dan jaringan rekrutmen (*recruitment networks*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga faktor ini menjadi hambatan bagi partisipasi masyarakat Desa Toundanow Atas. Dari segi sumber daya, keterbatasan pendidikan dan kondisi ekonomi yang menyulitkan menyebabkan sebagian masyarakat tidak memiliki waktu, keterampilan, dan akses informasi yang memadai untuk berpartisipasi secara efektif. Dari segi keterlibatan psikologis, rendahnya kepercayaan terhadap efektivitas partisipasi dan dominasi kultur politik paternalistik membuat banyak warga merasa bahwa keterlibatan mereka tidak akan membawa perubahan signifikan. Dari segi jaringan rekrutmen, temuan tentang diferensiasi partisipasi berdasarkan status sosial dan gender menunjukkan bahwa akses ke jaringan politik masih sangat tidak merata, di mana kelompok marginal kurang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses politik.

Sen (1999) dalam teori pembangunan sebagai kebebasan (*development as freedom*) berpendapat bahwa kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh kapabilitas (*capabilities*) yang mereka miliki untuk mengakses dan memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia. Dalam konteks penelitian ini, penguatan kesiapan masyarakat memerlukan pendekatan yang holistik yang tidak hanya fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada pengembangan kapabilitas politik masyarakat melalui pendidikan politik, penguatan literasi informasi, dan pembukaan akses yang lebih luas kepada kelompok-kelompok marginal untuk terlibat dalam proses politik. Peran kepemimpinan desa yang transformatif juga sangat krusial, di mana pemimpin tidak hanya bertindak sebagai *decision maker* tetapi juga sebagai fasilitator dan

enabler yang memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan kapasitas dan kemandirian mereka dalam berpartisipasi dalam demokrasi. Komitmen Sonny Akay untuk berperan aktif perlu diterjemahkan dalam praktik kepemimpinan yang membuka ruang partisipasi, mendorong dialog, dan membangun sistem yang transparan dan akuntabel.

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian tentang kesiapan masyarakat dalam demokrasi politik di Desa Toundanow Atas mengungkapkan bahwa meskipun struktur dan mekanisme formal demokrasi telah tersedia, namun kesiapan masyarakat untuk menjalankan demokrasi substantif masih memerlukan penguatan yang signifikan. Pemahaman masyarakat tentang demokrasi masih berorientasi pada dimensi prosedural, khususnya partisipasi dalam pemilihan kepala desa, sementara pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi yang lebih luas seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan masih terbatas. Pola partisipasi masyarakat cenderung bersifat mobilisatif dan didominasi oleh elit desa, belum mencapai tingkat deliberatif yang memungkinkan dialog rasional dan setara di antara semua segmen masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan masyarakat sangat beragam, mencakup tingkat pendidikan dan literasi politik, kondisi ekonomi, nilai-nilai budaya lokal dan keagamaan, serta kapasitas kepemimpinan desa dalam memfasilitasi proses demokratis. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan demokrasi di tingkat desa tidak cukup hanya dengan penyediaan struktur formal, tetapi memerlukan transformasi kultur politik dan penguatan kapasitas masyarakat secara holistik.

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan beberapa strategi untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam demokrasi politik di Desa Toundanow Atas. Pertama, penguatan pendidikan politik yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat, tidak hanya terbatas pada sosialisasi menjelang pemilihan tetapi juga mencakup pemahaman tentang hak-hak politik, mekanisme partisipasi, dan prinsip-prinsip good governance. Kedua, penciptaan ruang-ruang deliberasi yang inklusif yang memberikan akses dan kesempatan yang sama bagi semua segmen masyarakat, terutama kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat ekonomi lemah untuk menyuarakan aspirasi mereka. Ketiga, penguatan kapasitas kepemimpinan desa untuk bertransformasi dari pola kepemimpinan paternalistik menuju kepemimpinan yang fasilitatif dan transformatif yang memberdayakan masyarakat. Keempat, pengembangan sistem informasi dan komunikasi yang transparan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa. Implementasi strategi-strategi ini memerlukan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, masyarakat sipil, dan institusi pendamping, serta dukungan kebijakan dan sumber daya dari pemerintah daerah dan pusat.

#### **Daftar Pustaka**

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Antlov, H. (2003). Village Government and Rural Development in Indonesia: The New Democratic Framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193-214.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

- Fishkin, J. S. (2009). *When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation*. Oxford: Oxford University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mas'ood, M. (2006). *Negara, Kapital, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Pradana, G. Y. K. (2018). Implementasi Demokrasi Deliberatif dalam Musyawarah Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 45-62.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Sutoro, E. (2015). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Verba, S., Scholzman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Cambridge: Harvard University Press.
- Widjaja, H. (2014). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.